

RENCANA AKSI KINERJA

2025



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

ptunserang

ptun serang

<https://ptun-serang.go.id>

Ptun Serang



Rencana Aksi Kinerja
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
Tahun 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka mewujudkan Visi yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung”

dengan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	91%	91%	91%	91%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%	65%	65%	65%
		c. Index Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		1	2	3	4				
1.1	Indikator: Penyelesaian Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu							Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara	
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 3 bulan.	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara yang lebih dari 3 bulan.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
4.	Menunda persidangan dengan waktu relatif singkat (maksimal 14 hari)	√	√	√	√	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
5.	Memutus Perkara tidak melebihi 3 bulan.	√	√	√	√	Perkara yang diputus	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
6.	Mencoret/ <i>highlight</i> Perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran.	√	√	√	√	Perkara yang sudah melebihi batas waktu.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	

1.2	Indikator: Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi								Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara
1.	Menyusun Putusan Perkara Tingkat Pertama yang berkualitas	√	√	√	√	Putusan Perkara Tingkat Pertama yang berkualitas.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Mendata Perkara yang tidak melakukan upaya hukum Banding.	√	√	√	√	Terdatanya perkara yang tidak melakukan upaya hukum Banding.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Mendata Perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Tingkat Banding.	√	√	√	√	Terdatanya perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Tingkat Banding.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	

1.3	Indikator: Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan							9.526.604.000
1.	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat	√				Terbentuknya Tim Survey	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
2.	Menyusun <i>Job Description</i> Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	√				<i>Job Description</i> Tim SKM	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
3.	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat.	√				Jadwal dan Perangkat SKM	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
4.	Melaksanakan SKM (manual atau menggunakan aplikasi)	√	√	√	√	Kuisisioner SKM	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
5.	Mendata dan Merekapitulasi hasil SKM.	√	√	√	√	Data SKM	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

6.	Menyusun Laporan Hasil SKM.	√	√	√	√	Laporan SKM	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
7.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan menindaklanjuti hasil survey.	√	√	√	√	Laporan tindak lanjut hasil survey	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		1	2	3	4				
1	Indikator: Salinan Putusan Perkara TUN yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu							Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara	
1.	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	Terbentuknya Tim Survey	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
2.	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang Dilaksanakan	√	√	√	√	Job Description Tim SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

3.	Membuat Putusan sebelum sidang Pembacaan Putusan	√	√	√	√	Jadwal dan Perangkat SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
4.	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Kuisisioner SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
5.	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-Doc)	√	√	√	√	Data SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
6.	Mengirimkan Salinan Putusan kepada Para Pihak paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman Salinan Putusan ke SIPP.	√	√	√	√	Laporan SKM	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
7.	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian Salinan Putusan.	√	√	√	√	Laporan tindak lanjut hasil survey	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		1	2	3	4				
1.1	Indikator: Perkara Prodeo yang Diselesaikan							1.060.000	
1.	Mengumumkan melalui Website, Pamflet, Billboard, dan melalui Konsultan Posbakum.	√	√	√	√	Terpublikasinya program Prodeo yang dimiliki PTUN Serang.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Pelaksanaan Penyelesaian Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)		√		√	Terselesaikannya perkara melalui pembabasan biaya perkara yang diajukan.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Menyusun Laporan Perkara Prodeo yang Diselesaikan.		√		√	Laporan Prodeo	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	

4.	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan Penyelesaian Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)			√	√	Laporan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan Penyelesaian Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
----	--	--	--	---	---	---	---------------------------------------	---	--

1.2	Indikator: Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)								33.000.000
1.	Membentuk Tim Seleksi Pemilihan Konsultan Hukum Posbakum.	√				Terbentuknya SK Tim Seleksi Pemilihan Konsultan Hukum Posbakum.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Mengadakan MoU dengan Konsultan Hukum Terpilih.	√				Terjadinya perikatan hukum antara Satker dan Konsultan Hukum Posbakum.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Pelaksanaan Jam Layanan Posbakum.	√	√	√	√	Terlayannya Pencari Keadilan (orang) golongan tertentu yang mengajukan konsultasi hukum pada Posbakum.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
4.	Menyusun Laporan Posbakum	√	√	√	√	Laporan Posbakum.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
5.	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan layanan Posbakum.	√	√	√	√	Laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut layanan Posbakum.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	

1.3	Indikator: Penyelesaian Perkara TUN Melalui Sidang Di Luar Gedung Pengadilan							16.000.000
1.	Mendata perkara yang perlu diselesaikan di luar gedung pengadilan.	√	√			Terdatanya perkara yang memerlukan penyelesaian melalui sidang di luar gedung pengadilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
2.	Membentuk tim penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan.	√	√			Terbentuknya tim penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
3.	Menentukan tempat dan waktu pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan	√	√			Tersedianya tempat untuk proses penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
4.	Menyusun Laporan sidang di luar gedung		√	√		Laporan penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
5.	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.			√	√	Laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut sidang di luar gedung.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	90%	90%	90%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		1	2	3	4				
1	Indikator: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)							Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara	
1.	Pemberitahuan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.	√	√	√	√	Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
2.	Menerima Permohonan Eksekusi.	√	√	√	√	Terdaftarnya Permohonan Eksekusi.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
3.	Penyelesaian Eksekusi.	√	√	√	√	Penetapan/Pelaksanaan Eksekusi.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
4.	Menyusun Laporan Pelaksanaan Eksekusi.	√	√	√	√	Laporan Eksekusi.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
5.	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan eksekusi.	√	√	√	√	Laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan eksekusi.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara



Serang, 2 Januari 2025
KETUA,

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19760810 200012 1 001